

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga semakin berkembang. Hal ini mempermudah setiap orang dalam mengakses informasi seperti pada jejaring sosial yang telah disediakan berupa internet. Keadaan ini sangat menguntungkan, karena barang siapa yang memperoleh informasi lebih dibandingkan dengan orang lain maka orang tersebut akan memiliki nilai (*value*) lebih jika dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai informasi akan hal tertentu (Maziyar dkk, 2011). Tentunya di zaman yang modern ini, informasi yang cepat dan lebih sangatlah diperlukan oleh para pelaku bisnis sama halnya bagi sebuah instansi, baik untuk kegiatan operasional maupun dalam pengambilan keputusan finansialnya. Jadi agar sebuah informasi bisa menjadi data bagi *user* (pengguna) yang membantu dalam proses pengambilan keputusan maupun kegiatan operasionalnya maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mengolah data tersebut.

Seperti layaknya manusia yang tidak sempurna, sistem juga seperti itu, tidak sesempurna dari kelihatannya. Diciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin berkembangnya zaman juga membutuhkan perubahan-perubahan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna yang semakin meningkat. Bahkan sebuah sistem dapat

menghasilkan informasi yang menyesatkan apabila dijalankan oleh seseorang yang tidak berintegritas, oleh karena itu orang yang menjalankan sistem tersebut harus mempunyai kode etik (Otilia, 2014 dalam Permana, 2016).

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa sebuah sistem bisa berjalan dengan baik bukan hanya saja bagaimana hebatnya sebuah sistem diciptakan, tapi juga siapa yang menjalankan sistem tersebut, sangatlah mempengaruhi jalannya sistem operasional suatu instansi untuk pengambilan keputusan. Hal ini jelas karena sebuah sistem tidak berdiri sendiri tetapi ada bagian-bagian atau yang dikenal dengan sub sistem dalam melakukan sebuah kegiatan, jadi pengguna juga harus bisa memahami hal-hal tersebut. Sebagaimana dari pengertian sebuah sistem yang merupakan sekumpulan beberapa elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu (Fontanella dkk, 2010).

Setelah diciptakannya berbagai sistem, tentu akan membantu jalannya operasional sebuah perusahaan maupun instansi. Salah satu bidang yang terkait dengan pemanfaatan sebuah sistem adalah akuntansi. Sistem akuntansi adalah kumpulan elemen yang akan digunakan oleh pengelola keuangan untuk mencapai tujuan suatu lembaga/instansi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah sistem tentu terdapat input, proses, dan outputnya. Input dari sistem akuntansi merupakan kejadian yang menjadi

transaksi akuntansi, proses dalam sistem akuntansi yaitu merekam suatu peristiwa ekonomi sebagai suatu transaksi, menjurnal dan membukukan transaksi serta membuat ikhtisar tentang transaksi dalam berbagai laporan, sedangkan outputnya merupakan dokumen dan laporan akuntansi seperti statemen finansial atau laporan pertanggungjawaban (Permana, 2016). Namun disayangkan bahwa perkembangan sistem akuntansi di Indonesia sangat lamban dalam merespon tuntutan perkembangan zaman. Betapa tidak, sebab maraknya praktik KKN pada periode lama itu terjadi karena output yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan sering tidak akurat, terlambat dan tidak informatif.

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa sistem akuntansi merupakan kebutuhan bagi sebuah instansi pemerintahan untuk pengelolaan keuangannya. Hal ini berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan keuangan sebuah instansi pemerintah, dalam hal ini lembaga. Dimana laporan keuangan kementerian/kelembagaan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan APBD berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Pada hakikatnya penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dimana LKKL pada tahun 2004-2014 dihasilkan dari Sistem Keuangan Pengguna Anggaran

(SAKPA) dengan basis *cash towards accrual* (CTA) atau basis kas menuju akrual. Namun demikian bersamaan dengan amanat reformasi keuangan Negara serta sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, maka mulai tahun 2015 penyusunan LKKL menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual yaitu mengakui atau mencatat pendapatan dan belanja (biaya) pada saat transaksi terjadi bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Penerapan berbasis akrual ini jelas merupakan tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Sebab membutuhkan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit dan laporan keuangan hanya dapat disajikan secara periodik (semester dan tahunan), sehingga penyediaan informasi secara insidentil sebagai dasar pengambilan keputusan akan lebih sulit (Najati, dkk, 2017). Dengan demikian penerapan akuntansi basis akrual ini membutuhkan persiapan, oleh karena itulah diadakan masa transisi untuk menjembatani dari basis kas menuju akrual kepada basis akrual secara penuh yang diberlakukan mulai pada tahun 2005 sampai dengan 2014.

Hal ini berarti pada tahun 2015 untuk seluruh instansi pemerintah baik yang ada dipusat maupun didaerah harus sudah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Dengan demikian pada tahun ini sudah

memasuki tahun ke tiga penerapan akuntansi basis akrual. Dapat dikatakan belum terlalu lama memang, namun sudahkah memberikan manfaat dalam pelaporan keuangan pemerintah yang lebih tertib, akuntabel dan transparan? sebagaimana maksud diterapkannya akuntansi basis akrual yaitu agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual (Najati, dkk, 2017).

Terlepas dari konteks akuntansi berbasis akrual, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam penerapannya membutuhkan sebuah sistem, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai barisan terdepan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual telah mengembangkan sistem aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Aplikasi SAIBA merupakan sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sejalan dengan diterapkannya akuntansi basis akrual. Dapat dikatakan bahwa sistem aplikasi merupakan serangkaian prosedur dan program komputer yang melakukan tujuan akuntansi khusus (Fontanella, dkk. 2010).

Jadi tak hanya pada sektor swasta, peranan aplikasi disektor pemerintahan juga tidak kalah pentingnya. Terbukti dari berbagai macam

aplikasi yang telah diciptakan untuk membantu proses akuntansi pada sebuah instansi/lembaga pemerintahan. Dimana keseluruhan proses sudah menggunakan sistem aplikasi komputer sehingga lebih memudahkan terutama dalam hal menghasilkan laporan keuangan, yang juga diharapkan bisa tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi yaitu SAIBA merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual. Karena dengan adanya sistem aplikasi akan memudahkan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Seperti resiko salah ketik, kesalahan penjumlahan, kesalahan klarifikasi akun, akan bisa diminimalisir dengan adanya aplikasi tersebut yang nantinya output yang dihasilkan juga lebih akurat dan valid (Permana, 2016). Memang pada dasarnya sebuah sistem memiliki kekurangan, layaknya aplikasi SAIBA ini. Oleh karena itu disamping hebatnya sebuah sistem, juga dibutuhkan *user* (pengguna) yang berkompeten agar bisa mengoperasikannya dengan baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Penerapan SAIBA ini juga tentunya bersamaan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, jadi penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu PMK 177 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak terkecuali juga pada lembaga pemerintah daerah yang satu ini, yaitu KPU Provinsi Gorontalo. Dimana sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/walikota yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah.

KPU Provinsi Gorontalo merupakan lembaga pemerintah daerah yang kita ketahui bersama merupakan penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dan kebetulan peneliti juga pernah ikut terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo menjelang pemilihan Gubernur bulan lalu. Karena peneliti merupakan salah satu peserta magang yang ditempatkan di lembaga pemerintah daerah tersebut. Hal ini jugalah yang menjadi ketertarikan awal peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan mengamati dan pernah terlibat dalam setiap aktifitas di KPU Provinsi Gorontalo, khususnya dibagian keuangan.

Berangkat dari wawancara awal peneliti juga dengan *user* (pengguna) atau lebih sering disebut dengan operator, terkait sistem akuntansi instansi berbasis akrual yang sebelumnya dikenal dengan SAI (Sistem Akuntansi Instansi). Laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan dan asset, yang tak hanya berasal dari aplikasi SAIBA namun juga berasal dari SIMAK-BMN

(Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang milik Negara) oleh karena itu cenderung terdapat selisih dari aplikasi SIMAK-BMN ke SAIBA. Dan aplikasi SAIBA ini sering berubah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi peneliti. Bukankah seharusnya aplikasi tersebut memudahkan pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya? kenyataannya sistem aplikasi SAIBA ini memang seringkali menjadi momok (ketakutan) tersendiri bagi pengelola (operator) oleh karena aplikasinya yang sering berubah.

Tak hanya pada sistem aplikasi terkadang prosedur yang dilakukan belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Karena berdasarkan studi pendahuluan laporan keuangan belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi berbasis akrual. Seharusnya sebagai pelaku pengguna anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab laporan keuangan atas realisasi dana yang didapatkan dari pemerintah daerah, KPU Provinsi Gorontalo membuat laporan keuangan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya yang didasarkan atas SAP yang berlaku. Dalam hal ini berarti penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, hal inilah yang akan menjadi fokus utama peneliti walaupun tidak menutup kemungkinan akan

berkembang pada saat proses penelitian. Jadi tak hanya mengenai penerapan aplikasi SAIBA, juga mengenai standar akuntansi yang telah diberlakukan oleh pemerintah keuangan belum lama ini yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, karena pelaksanaan sistem akuntansi harus didasarkan pada Prinsip-Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) yang dituangkan dalam bentuk standar akuntansi (Zawitri, dkk, 2015).

Hal diatas menunjukkan bahwa kedua hal tersebut memang saling berkaitan satu sama lain. Sebab perubahan sistem aplikasi SAIBA ini oleh karena adanya perubahan basis akuntansi instansi pemerintah yang semula basis kas menjadi basis akrual. Dari penelitian yang dilakukan oleh Najati dkk (2017) juga menjelaskan bahwa, semakin baik implementasi akuntansi berbasis akrual, semakin mendorong penggunaan aplikasi SAIBA dalam penyusunan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga), ini merupakan bukti adanya pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap penggunaan aplikasi SAIBA. Jadi penelitian ini, bukan mengenai detilnya aplikasi SAIBA dijalankan melainkan penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Sistem Akuntansi Instansi

Berbasis AkruaI Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada KPU Provinsi Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.
2. Sistem akuntansi instansi yaitu aplikasi SAIBA yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan masih sering berubah-ubah.
3. Keterlambatan proses penyusunan laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI dalam penyusunan laporan keuangan pada KPU Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI pada KPU Provinsi Gorontalo.

2. Untuk mengetahui penerapan sistem aplikasi SAIBA dalam penyusunan laporan keuangan pada KPU Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, serta pembelajaran untuk menjadi bekal bagi pembaca maupun penulis kelak, apabila ingin terjun dalam lingkup akuntansi pemerintahan. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang sejenis dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal dan dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem aplikasi akuntansi khususnya sistem aplikasi SAIBA.